

**MUSIK PUNK SEBAGAI EKSPRESI KEWARGANEGARAAN KRITIS:
ANALISIS WACANA KRITIS KRITIK TERHADAP APARAT NEGARA DALAM
LIRIK LAGU 'BALADA GEHEL' KARYA DONGKER**

Yayang Ramadhan¹, Sapriya², Vini Agustiani Hadian³

^{1, 2, 3} PPKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

¹yyngrmdhn.27@upi.edu, ²sapriya@upi.edu, ³viniaugustiani87@upi.edu

ABSTRACT

This study aims to analyze the representation of state authorities in the song lyrics of Balada Gehel by Dongker and examine its function as a form of critical citizenship expression. The research employs a qualitative approach using Critical Discourse Analysis (CDA) by integrating the frameworks of Teun A. van Dijk and Norman Fairclough. The data consist of song lyrics, audiovisual documentation, and contextual sources related to Indonesia's socio-political conditions in 2020. The findings reveal that state authorities are represented through degradative metaphors, institutional delegitimization, and emotional contrasts that reflect criticism of power practices. Furthermore, the song functions as a medium of civic expression that expands democratic participation through popular culture. The study suggests that punk music has significant potential as a contextual learning resource for fostering civic sensibility and civic responsibility within Citizenship Education.

Keywords: *Critical Citizenship; Critical Discourse Analysis; Citizenship Education; Punk Music; State Authority Representation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi aparat negara dalam lirik lagu *Balada Gehel* karya Dongker serta mengkaji fungsinya sebagai bentuk ekspresi kewarganegaraan kritis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) yang mengintegrasikan model Teun A. van Dijk dan Norman Fairclough. Data penelitian berupa lirik lagu, dokumentasi audiovisual, serta berbagai sumber kontekstual yang berkaitan dengan situasi sosial-politik Indonesia pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat negara direpresentasikan melalui metafora degradatif, delegitimasi institusi, dan kontras emosional yang merefleksikan kritik terhadap praktik kekuasaan. Selain itu, lagu berfungsi sebagai media *civic expression* yang memperluas ruang partisipasi demokratis melalui budaya populer. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa musik punk memiliki potensi sebagai sumber pembelajaran kontekstual untuk mengembangkan *civic sensibility* dan *civic responsibility* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Kewarganegaraan Kritis; Musik Punk; Representasi Aparat Negara; Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Demokrasi pada dasarnya mensyaratkan hubungan yang sehat antara negara dan warga negara melalui penghormatan terhadap hak-hak sipil, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas kekuasaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, relasi tersebut menunjukkan dinamika yang semakin kompleks di Indonesia. Amnesty International Indonesia (2020) melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020, termasuk penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap massa aksi. Situasi tersebut memunculkan perdebatan publik mengenai posisi aparat negara dalam sistem demokrasi serta sejauh mana negara menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan hubungan aparat dan warga negara masih menjadi isu penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia kontemporer.

Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, bentuk-bentuk partisipasi dan ekspresi politik warga negara mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya kritik terhadap negara banyak disampaikan melalui demonstrasi jalanan atau forum politik formal, saat ini ekspresi tersebut semakin banyak hadir dalam ruang budaya dan media digital. Menurut Hall (1997), representasi budaya memiliki peran penting dalam membentuk makna sosial sekaligus menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan dan relasi kekuasaan. Perkembangan teknologi komunikasi telah memperluas ruang ekspresi warga negara sehingga kritik sosial dapat disampaikan melalui berbagai medium budaya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, musik menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk menyuarakan pengalaman sosial dan ketidakpuasan terhadap kondisi politik yang berkembang.

Sebagai produk budaya populer, musik memiliki kemampuan untuk

menghubungkan pengalaman personal dengan persoalan sosial yang lebih luas. Street (2012) menjelaskan bahwa musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai medium komunikasi politik yang mampu membangun kesadaran kolektif di kalangan pendengarnya. Dalam berbagai konteks sosial, musik sering digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan, mengartikulasikan identitas kelompok, serta mendorong lahirnya solidaritas sosial. Bahkan, Eyerman dan Jamison (1998) menegaskan bahwa musik dapat berfungsi sebagai bagian dari gerakan sosial karena kemampuannya dalam membangun memori kolektif dan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan musik protes tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara budaya, kekuasaan, dan partisipasi warga negara.

Salah satu karya musik yang muncul dalam konteks tersebut adalah lagu Balada Gehel karya Dongker yang dirilis pada November 2020. Lagu ini lahir pada periode yang berdekatan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap tindakan

represif aparat dalam demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Berdasarkan data platform digital yang tercantum dalam penelitian ini, Balada Gehel telah memperoleh lebih dari 2,5 juta pemutaran di Spotify serta ratusan ribu tayangan di YouTube. Tingginya angka konsumsi tersebut menunjukkan bahwa lagu ini tidak hanya beredar dalam lingkup komunitas musik underground, tetapi juga menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda. Dengan demikian, lagu ini menarik untuk dikaji sebagai representasi budaya yang merekam sekaligus merespons situasi sosial-politik tertentu.

Jika ditelaah secara tekstual, lirik Balada Gehel mengandung berbagai ungkapan yang merepresentasikan kritik terhadap aparat negara dan sistem hukum yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Ungkapan seperti *“penuh aparat serupa kencur”* dan *“aturanmu terlampau basi”* menunjukkan adanya konstruksi makna yang menempatkan aparat sebagai simbol kekuasaan yang dipersoalkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, bahasa tidak

dipahami sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai praktik sosial yang selalu berkaitan dengan ideologi dan relasi kekuasaan (Van Dijk, 1997). Oleh karena itu, lirik lagu dapat dipandang sebagai bentuk produksi wacana yang berupaya membangun pemahaman tertentu mengenai posisi negara dan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Analisis terhadap representasi tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana kritik sosial dikonstruksi melalui medium budaya populer.

Meskipun penelitian mengenai lirik lagu punk dan musik kritik sosial telah cukup berkembang, sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada aspek linguistik, semiotika, dan komunikasi. Berbagai penelitian menganalisis pilihan bahasa, metafora, atau pesan kritik yang terkandung dalam lirik tanpa menghubungkannya dengan dimensi kewarganegaraan yang lebih luas. Padahal, sebagaimana dikemukakan Giroux (2011), ekspresi budaya dapat menjadi ruang pedagogis yang memungkinkan warga negara mengembangkan kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan yang ada

di masyarakat. Dengan kata lain, musik tidak hanya dapat dipahami sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai praktik kewarganegaraan yang memiliki implikasi terhadap pembentukan sikap dan kesadaran politik warga negara. Keterbatasan kajian sebelumnya inilah yang menunjukkan adanya celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Selain itu, konsep *civic expression* melalui budaya populer masih relatif jarang dikaji dalam disiplin Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia. Chotimah (2012) menjelaskan bahwa warga negara demokratis tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga kemampuan untuk mengekspresikan pandangan, kritik, dan aspirasi secara bertanggung jawab dalam ruang publik. Dalam konteks masyarakat digital, ekspresi tersebut tidak selalu hadir melalui jalur politik formal, melainkan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk produksi budaya, termasuk musik. Oleh karena itu, kajian terhadap Balada Gehel menjadi relevan karena memungkinkan

pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana budaya populer berfungsi sebagai sarana artikulasi kewarganegaraan kritis di kalangan generasi muda. Perspektif ini sekaligus memperluas ruang lingkup kajian PPKn yang selama ini lebih banyak berorientasi pada institusi dan partisipasi politik formal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana representasi aparat negara dikonstruksi dalam lirik lagu *Balada Gehel* karya Dongker melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana lirik lagu tersebut berfungsi sebagai bentuk ekspresi kewarganegaraan kritis (*critical citizenship expression*) yang berkembang melalui budaya populer. Penelitian ini juga akan mengkaji relevansi temuan tersebut terhadap pengembangan *civic sensibility* dan *civic responsibility* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kewarganegaraan kritis sekaligus memperkaya pemanfaatan budaya

populer sebagai sumber pembelajaran PPKn yang kontekstual dan relevan dengan pengalaman generasi muda masa kini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) untuk mengkaji representasi aparat negara dalam lirik lagu *Balada Gehel* karya Dongker sebagai bentuk ekspresi kewarganegaraan kritis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna yang terkandung dalam teks secara mendalam dengan mempertimbangkan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan realitas sosial. Menurut Van Dijk (1997), wacana tidak hanya dipahami sebagai struktur bahasa, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks ideologis dan relasi kekuasaan. Data primer dalam penelitian ini berupa transkripsi lirik lagu *Balada Gehel* serta dokumentasi audiovisual berupa video klip dan penampilan langsung lagu tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, laporan lembaga independen,

pemberitaan media massa, serta dokumen yang berkaitan dengan kondisi sosial-politik Indonesia pada periode Oktober–November 2020 yang menjadi konteks lahirnya lagu tersebut.

Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk dan Norman Fairclough. Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada struktur makro berupa tema utama dan proposisi dominan, serta struktur mikro yang meliputi pilihan leksikal, metafora, konotasi, dan bentuk representasi bahasa yang digunakan dalam lirik lagu (Van Dijk, 1997). Selanjutnya, dimensi kognisi sosial digunakan untuk mengidentifikasi ideologi, cara pandang, dan posisi pencipta lagu terhadap aparat negara serta relasi negara dan warga negara. Pada dimensi konteks sosial, interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan situasi politik Indonesia saat maraknya demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai laporan mengenai tindakan represif aparat terhadap massa aksi (Amnesty International Indonesia, 2020). Analisis tersebut kemudian diperkuat dengan

pendekatan Fairclough (1995) yang menempatkan lagu sebagai praktik sosiokultural yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui ruang publik digital.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis lirik lagu dengan data kontekstual, dokumentasi audiovisual, serta berbagai kajian ilmiah yang relevan. Denzin (1978) menjelaskan bahwa triangulasi memungkinkan peneliti meningkatkan kredibilitas temuan melalui penggunaan berbagai sumber informasi yang saling melengkapi. Selain itu, validasi dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian hasil interpretasi dengan temuan penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis dalam mengkaji musik, budaya populer, dan kritik sosial. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan bias subjektivitas peneliti dalam proses penafsiran data. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid dan komprehensif mengenai konstruksi representasi aparat negara serta fungsi lagu *Balada Gehel*

sebagai medium ekspresi kewarganegaraan kritis.

penggunaan bahasa yang satir dan konfrontatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis pada dimensi teks menunjukkan bahwa representasi aparat negara dalam lirik *Balada Gehe!* dikonstruksi secara dominan melalui metafora yang bersifat degradatif. Salah satu ungkapan yang menonjol adalah frasa "*aparat serupa kencur*" yang menghadirkan citra aparat sebagai pihak yang belum matang, kurang kompeten, dan tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan kewenangannya. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, pilihan leksikal semacam ini tidak sekadar berfungsi sebagai gaya bahasa, melainkan sebagai strategi representasi untuk membangun posisi tertentu terhadap objek yang dibicarakan (Van Dijk, 1997). Melalui metafora tersebut, aparat tidak direpresentasikan sebagai pelindung warga negara, melainkan sebagai simbol kekuasaan yang dianggap gagal menjalankan fungsi demokratisnya. Temuan ini menunjukkan adanya konstruksi wacana yang berupaya mendeligitimasi otoritas aparat melalui

Representasi negatif terhadap institusi negara juga tampak pada penggunaan metafora "*beton angkuh yang telah hancur*" serta ungkapan "*aturanmu terlampaui basi*". Menurut Hall (1997), representasi budaya bekerja melalui proses produksi makna yang memungkinkan suatu kelompok menafsirkan realitas sosial berdasarkan pengalaman kolektif yang mereka alami. Dalam konteks lirik ini, metafora beton yang hancur menggambarkan runtuhnya legitimasi moral institusi negara di mata sebagian warga negara. Sementara itu, frasa "*aturanmu terlampaui basi*" merepresentasikan hukum sebagai instrumen yang dianggap tidak lagi responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan cenderung digunakan sebagai alat kontrol sosial. Secara keseluruhan, konstruksi bahasa yang muncul dalam lirik menunjukkan adanya delegitimasi terhadap otoritas negara yang dipandang tidak mampu menghadirkan keadilan sosial bagi warga negara.

Selain penggunaan metafora, hasil penelitian menemukan adanya

pola leksikal yang mempertemukan oposisi makna antara harapan dan kenyataan, serta antara rasa cinta dan kekecewaan terhadap negara. Strategi ini terlihat dari perpindahan narasi antara keinginan untuk hidup dalam tatanan sosial yang adil dengan pengalaman empiris yang menunjukkan kondisi sebaliknya. Fairclough (1995) menjelaskan bahwa struktur wacana semacam ini sering digunakan untuk memperkuat daya persuasif suatu teks karena mampu membangun kontras emosional yang kuat di benak audiens. Dalam lagu *Balada Gehel*, kontras tersebut tidak diarahkan untuk menolak negara secara keseluruhan, melainkan untuk mengkritik praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan dalam lirik dapat dipahami sebagai bentuk *civic critique* yang lahir dari kekecewaan terhadap realitas sosial yang dianggap tidak sesuai dengan harapan warga negara.

Pada dimensi kognisi sosial, hasil analisis menunjukkan bahwa lirik *Balada Gehel* dibangun di atas kerangka berpikir kritis yang mempertanyakan rasionalitas praktik

kekuasaan negara. Hal ini terlihat dari penyebutan tokoh intelektual Yasraf Amir Piliang yang secara simbolik digunakan untuk menggambarkan situasi ketika nalar kritis dan pengetahuan akademik seolah tidak lagi memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan publik. Van Dijk (1998) menyebut bahwa kognisi sosial mencerminkan sistem keyakinan, pengetahuan, dan ideologi yang memengaruhi proses produksi sebuah wacana. Dalam konteks ini, posisi ideologis Dongker tampak berpihak pada kelompok masyarakat yang mengalami atau menyaksikan dampak langsung tindakan represif aparat. Dengan demikian, lirik lagu tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi artistik, tetapi juga sebagai artikulasi pandangan politik yang berakar pada pengalaman sosial tertentu.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa musik punk dalam *Balada Gehel* berfungsi sebagai *counter-discourse* atau wacana tanding terhadap narasi resmi negara. Temuan tersebut sejalan dengan karakteristik budaya punk yang secara historis berkembang sebagai medium resistensi terhadap berbagai bentuk

dominasi dan ketidakadilan sosial (Dunn, 2016). Posisi ini tampak serupa dengan berbagai ekspresi kritik sosial kontemporer yang muncul melalui musik independen di Indonesia, termasuk fenomena lagu-lagu protes yang memperoleh perhatian luas di ruang digital. Melalui perspektif ini, *Balada Gehel* tidak hanya menyampaikan kritik terhadap tindakan aparat, tetapi juga menawarkan sudut pandang alternatif mengenai relasi antara negara dan warga negara. Kehadiran wacana tanding tersebut memperlihatkan bahwa ruang budaya masih menjadi arena penting dalam kontestasi makna dan kekuasaan.

Pada dimensi konteks sosial, hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara isi lirik dengan situasi sosial-politik Indonesia pada tahun 2020. Lagu ini dirilis tidak lama setelah demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diwarnai berbagai laporan mengenai tindakan represif aparat terhadap massa aksi (Amnesty International Indonesia, 2020). Selain faktor temporal, keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh konteks Bandung sebagai salah satu pusat

perkembangan musik punk dan budaya perlawanan di Indonesia sejak dekade 1990-an (Prasetyo, 2017). Di sisi lain, penyebaran lagu melalui platform digital yang berhasil menjangkau jutaan pendengar menunjukkan bahwa kritik sosial yang disampaikan memiliki resonansi yang cukup luas di ruang publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa musik dapat berfungsi sebagai medium yang menjembatani pengalaman lokal dengan diskursus sosial yang lebih luas dalam masyarakat digital.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Balada Gehel* dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kewarganegaraan kritis yang memiliki relevansi pedagogis. Street (2012) menegaskan bahwa musik mampu berfungsi sebagai saluran demokrasi alternatif yang memperluas ruang deliberasi publik di luar mekanisme politik formal. Melalui lirik yang memuat kritik terhadap kekuasaan, pendengar tidak hanya memperoleh informasi mengenai persoalan sosial, tetapi juga didorong untuk mengembangkan kepekaan terhadap isu-isu publik. Sejalan dengan

gagasan Budimansyah (2010), proses tersebut dapat dipahami sebagai transformasi dari *knowing*, *feeling*, *caring*, hingga *acting* dalam pembentukan karakter kewarganegaraan. Oleh karena itu, analisis lirik musik protes berpotensi diintegrasikan ke dalam pembelajaran PPKn sebagai sumber belajar yang mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan kewarganegaraan dan praktik partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis terhadap lirik lagu *Balada Gehel* karya Dongker, penelitian ini menemukan bahwa representasi aparat negara dikonstruksi melalui berbagai strategi kebahasaan yang bersifat kritis dan delegitimatif. Penggunaan metafora seperti "*aparat serupa kencur*", "*beton angkuh yang telah hancur*", dan "*aturanmu terlampau basi*" menunjukkan upaya pengarang dalam membangun citra aparat sebagai simbol kekuasaan yang dianggap tidak kompeten, represif, dan kehilangan legitimasi di mata

masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Hall (1997), representasi merupakan proses produksi makna yang tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan relasi kuasa dan pengalaman sosial tertentu. Melalui pilihan leksikal, metafora, serta kontras emosional antara harapan dan kenyataan, lirik lagu ini menghadirkan kritik terhadap praktik kekuasaan yang dipersepsikan menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa bahasa dalam musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi artistik, tetapi juga sebagai medium pembentukan wacana sosial dan politik.

Pada dimensi kewarganegaraan, penelitian ini menunjukkan bahwa *Balada Gehel* berfungsi sebagai bentuk *civic expression* atau ekspresi kewarganegaraan kritis yang hadir melalui budaya populer. Street (2012) menegaskan bahwa musik memiliki kapasitas untuk menjadi ruang demokrasi alternatif yang memungkinkan warga negara menyampaikan aspirasi dan kritik di luar jalur politik formal. Dalam konteks penelitian ini, lagu berperan sebagai

media artikulasi pengalaman sosial, penyampaian kritik terhadap institusi negara, sekaligus sarana membangun kesadaran publik mengenai isu-isu demokrasi. Selain itu, penggunaan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Van Dijk yang dipadukan dengan perspektif Fairclough terbukti efektif dalam mengungkap keterkaitan antara teks, ideologi, dan konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu karya budaya (Fairclough, 1995; Van Dijk, 1998). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa teks budaya populer dapat menjadi objek kajian yang relevan untuk memahami praktik kewarganegaraan dalam masyarakat kontemporer.

Implikasi penelitian ini bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terletak pada potensi pemanfaatan budaya populer sebagai sumber belajar yang kontekstual dan dekat dengan pengalaman generasi muda. Menurut Chotimah (2012), pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap kritis dan partisipatif sebagai warga negara. Oleh karena itu, musik punk dan

berbagai bentuk musik protes lainnya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan *civic sensibility* serta *civic responsibility* peserta didik melalui refleksi terhadap isu-isu sosial yang nyata. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji resepsi pendengar terhadap pesan kewarganegaraan yang terkandung dalam lagu, melakukan studi komparatif dengan karya musik kritik sosial lainnya, serta mengeksplorasi integrasi analisis lirik musik dalam desain pembelajaran PPKn berbasis budaya populer. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pengembangan kajian kewarganegaraan kritis sekaligus memperkaya inovasi pembelajaran PPKn yang relevan dengan dinamika masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2020). *Indonesia: Police Violence and Human Rights Violations During Omnibus Law Protests*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Chotimah, U. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dan*

- Pembangunan Karakter Bangsa. Bandung: Laboratorium PPKn UPI.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Dunn, K. (2016). *Global Punk: Resistance and Rebellion in Everyday Life*. New York: Bloomsbury Academic.
- Eyerman, R., & Jamison, A. (1998). *Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in The Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Giroux, H. A. (2011). *On Critical Pedagogy*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Prasetyo, A. (2017). *Musik Punk dan Gerakan Perlawanan Budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Street, J. (2012). *Music and Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Van Dijk, T. A. (1997). *Discourse as Social Interaction*. London: Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage Publications.